Fadhlullah SE Inspirasi Bagi Program Reintegrasi

JABATANNYA sebagai komandan operasi GAM wilayah Pidie (1999-2004), sudah cukup sebagai bukti bahwa dia adalah kombatan GAM asli. Ketika Aceh masih membara, Fadhlullah Bersama pasukannya berkali-kali terlibat kontak senjata dengan aparat TNI/Polri dari berbagai kesatuan. Namun, segera setelah pimpinan GAM memutuskan untuk berdamai, Fadhlullah mengubah perjuangannya, dari gerakan bersenjata menjadi perjuangan politik. Fadhlullah yang telah dua periode duduk sebagai anggota DPR Republik Indonesia, disebut-sebut sebagai salah satu contoh sukses program reintegrasi pascakonflik bersenjata, bukan hanya untuk Aceh dan Indonesia, tapi juga untuk dunia.

Fadhlullah atau biasa disapa Dek Fad, bisa dibilang adalah salah satu dari hanya beberapa kombatan GAM yang paling sukses merintis karir di bidang politik. Mengawali karir politiknya sebagai kader Partai Aceh (PA) yang dibentuk oleh para mantan kombatan GAM, Fadhlullah menjelma menjadi salah satu politikus Aceh yang meniti karir hingga ke level nasional.

Yang mencengangkan, Fadhlullah merintis karir politik di kancah nasional ini melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dibesut oleh mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto. Pada masa lalu, Kopassus adalah salah satu satuan elite militer Indonesia yang kerap berhadapan dengan Dek Fad dan pasukannya di lapangan.

"Saya masuk ke Partai Gerindra atas instruksi dari Mualem (Muzakir Manaf – mantan Panglima GAM). Karena saat itu, Partai Gerindra berafiliasi dengan Partai Aceh," kata Dek Fad dalam sebuah wawancara yang disiarkan di kanal Youtube Serambinews.com, Minggu (5/2/2023).

Bisa dibilang, Dek Fad adalah sosok yang sangat tunduk dan patuh kepada pimpinan. Keputusannya untuk mengubah perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik, juga tidak terlepas dari arahan pimpinan GAM, setelah penandatanganan MoU damai di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Karena perintah pimpinan pula, Dek Fad bergabung dengan Partai Gerindra yang notabenenya adalah partai yang didirikan oleh mantan Danjen Kopassus, salah satu satuan militer yang menjadi musuh bebuyutannya pada masa lalu.

"Awalnya memang agak ragu, tapi setelah saya membaca manifesto Partai Gerindra, ternyata tidak jauh berbeda dengan cita-cita Partai Aceh. Kedua partai ini sama-sama ingin melakukan perubahan dan membantu rakyat kecil dan tertindas. Lalu, saya bergabung ke Partai Gerindra dan menjadi caleg DPR RI pada Pemilu 2014, dengan tujuan menjadi penyambung lidah untuk kepentingan Aceh di tingkat nasional, termasuk memperjuangkan cita-cita GAM untuk kesejahteraan rakyat Aceh," kata Dek Fad.

Meski bergabung dengan Partai Gerindra dan kini menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Aceh (sejak Desember 2022), tapi Dek Fad tetap menganggap diri sebagai kader Partai Aceh yang merupakan wadah perjuangan politik para mantan kombatan GAM. "Sampai kapan pun saya adalah orang GAM. Di Senayan (Kompleks DPR RI) pun saya menyampaikan bahwa saya adalah GAM dan saya hadir di Senayan karena partai saya (Partai Aceh) berafiliasi dengan Partai Gerindra," ungkap Dek Fad.

Bagaimana tanggapan Prabowo Subianto dan petinggi Partai Gerindra lain?. "Pak Prabowo tidak mempersoalkan itu. Beliau bilang 'oke, silakan'. Bahkan di dalam pertemuan dengan 78 anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Pak Prabowo memerintahkan semua anggota DPR RI dari Partai Gerindra harus menampung setiap aspirasi rakyat Aceh, sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Aceh. Dan itu dijalankan oleh Fraksi Partai Gerindra di DPR RI," ungkap Dek Fad.

Kini, bersama Partai Gerindra dan para anggota DPR RI asal Aceh dari lintas partai politik, konsen memperjuangkan kepentingan Aceh di level nasional. Salah satu yang menjadi fokus mereka adalah memperjuangkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh bisa berlaku selamanya, serta beberapa poin dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh yang belum sejalan dengan butir-butir MoU Helsinki. "Saat ini kita sedang fokus mengupayakan revisi Undang Undang Pemerintah Aceh agar bisa menampung seluruh butir-butir MoU Helsinki yang merupakan konsekuensi dari perjanjian damai antara GAM dengan RI," ungkap Fadhlullah.(*)

DATA DIRI

Nama: Fadhlullah, S.E

Tempat/Tgl Lahir: Desa Simpang / 19 Juni 1981

Agama: Islam

Riwayat Pendidikan:

- SD Negeri Aron (1987 – 1993)
- MTTS Jeumala Amal Leung Putu (1993 – 1996)
- Madrasah Aliyah Darussa'adah Glumpang Tiga Tahun: (2008)
- Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Banda Aceh (2017)

PEKERJAAN:

- Anggota DPR RI asal Aceh I (periode 2014-2019 dan 2019 – 2024)

RIWAYAT ORGANISASI:

- Panglima Komandan Operasi GAM Wilayah Pidie (1999 – 2004)
- Wakil Ketua DPA Partai Aceh (2005 -)
- Bendahara OKP Mahasiswa Pancasila Kab. Pidie (2010 – 2012)
- Ketua KNPI Pidie (2012 – 2016)
- Bendahara Umum Partai Gerindra Aceh (2013 - 2022)
- Wakil Ketua Kadinda Pidie (2011-2016)
- Anggota Himpunan Pengusaha Migas Aceh (2009 -).
- Ketua DPD Partai Gerindra Aceh (2022 -)

Dari Dan Ops GAM Hingga Anggota DPR RI

LAHIR dan besar di salah satu wilayah pusaran konflik Aceh, yakni Teupin Raya, Kabupaten Pidie, membuat Fadhlullah sangat akrab dengan berbagai gerakan perjuangan. Ayahnya adalah salah satu orang Aceh yang ikut hadir ketika Tgk Hasan Muhammad Ditiro (Hasan Tiro) mendeklarasikan Aceh Merdeka (AM) di Bukit Halimon, Kabupaten Pidie, 4 Desember 1976.

Fadhlullah mulai terlibat secara resmi dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1997 atau satu tahun setelah dia menamatkan pendidikan menengahnya di MTsS Jeumala Amal Lueng Putu (tamat tahun 1996). Kepiawaiannya dalam memimpin perang gerilya di wilayah Pidie yang merupakan pusat konflik bersenjata di Aceh, membuat dia dipercaya sebagai Panglima Operasi Aceh GAM Pidie. Jabatan komandan lapangan ini dia emban sejak tahun 1999 hingga 2004.

Untuk diketahui, Teupin Raya Kabupaten Pidie, tempat Fahdlullah lahir dan dibesarkan adalah salah satu wilayah pusaran konflik bersenjata di Aceh. Di kawasan ini lah, Tgk Abdullah Syafii, panglima GAM paling legendaris bermarkas. Fadhlullah sempat dua tahun menjadi pengawal pribadi Tgk Abdullah Syafii.

Seperti kebanyakan pejuang GAM, Fadhlullah ingin memperjuangkan kemerdekaan bagi Aceh yang semenjak menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1945, dinilai mengalami perlakuan tidak adil. Masyarakat Aceh jatuh dalam jurang kemiskinan, sebagian besar terjadi karena ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan antara pusat dan daerah.

Administrasi terpusat dari Orde Baru menimbulkan kekecewaan yang serius, terutama di kalangan elite Aceh, dimana Aceh menerima 1 persen dari perkiraan pendapatan nasional, sementara Aceh telah memberikan kontribusi 14 persen dari PDB Nasional. Konflik bersenjata antara Aceh dengan Pemerintah Pusat ini, berakhir pada 2005 di meja perundingan di Helsinki, Finlandia, dengan harapan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Berjuang Melalui Politik

Setelah damai bersemi di Aceh, Fadhlullah kembali melanjutkan pendidikannya yang sempat terputus. Pada tahun 2005, dia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Darussa'adah Glumpang Tiga, Pidie (tamat tahun 2008).

Darah organisasi dan perjuangannya untuk kesejahteraan rakyat Aceh yang mengalir deras di dalam nadinya. Hal ini membuat dia mencoba perjuangan melalui jalur baru, yaitu jalur politis formal, sesuai dengan amanah MoU Helsinki. Karir politiknya ini diawali dengan bergabung dalam kepengurusan Partai Aceh di Kabupaten Pidie pada tahun 2005.

Partai Aceh ini adalah partai lokal yang dibentuk oleh para mantan kombatan GAM, dengan Ketua Umumnya dijabat oleh Muzakir Manaf (mantan Panglima GAM). Keterlibatannya dalam Partai Aceh inilah yang mengantarkan Fadhlullah menjadi anggota dari Partai Gerindra yang didirikan dan dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto.

Menjelang Pemilu 2014, Partai Gerindra dan Partai Aceh berafiliasi dan menjadi mitra koalisi. Salah satu bentuk afiliasi ini, Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf menjadi pembina bagi Partai Gerindra di Aceh. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada para mantan kombatan yang direkomendasikan oleh Partai Aceh untuk maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra.

Setelah berkoalisi dengan Partai Aceh, Partai Gerindra termasuk partai nasional yang mendapatkan hasil suara terbanyak untuk DPR RI dan berhasil mengirim dua kadernya ke Senayan pada Pemilu Legislatif 2014.

Fadhlullah, mantan Komandan Operasi GAM Wilayah Pidie, adalah salah satu eks pejuang GAM yang sukses menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Setelah melalui periode 2014-2019, Fadhlullah yang kembali bertarung di Dapil Aceh-1 pada Pemilu 2019, kembali terpilih dan menjabat sebagai anggota DPR RI.

Saat ini, Fadhlullah menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR RI; Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Anggota Global Organization of Parliamentarian Against Corruption (GOPAC), Anggota Pengurus Pusat Pemuda Tani Indonesia periode 2016-2021.

Sebelum terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah aktif dalam berbagai organisasi di level Kabupaten Pidie maupun Provinsi Aceh. Website DPR RI menulis, Fadhlullah pernah menjabat sebagai Bendahara OKP Mahasiswa Pancasila Kabupaten Pidie (2010 - 2012), Ketua KNPI Pidie (2012 - 2016).

Tidak hanya di organisasi pemuda dan kemasyarakatan, Fadhlillah juga aktif di organisasi pengusaha. Dia tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kadinda Pidie (2011-2016) dan Anggota Himpunan Pengusaha Migas Aceh (2009 -). Keaktifannya di organisasi pengusaha ini sangat beralasan, karena sejak tahun 2008 hingga 2014, dia maupun sebagai Presiden Direktur PT Krueng Simpang.(*)

Kiprah Dek Fad di Senayan

MESKI Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia telah sepakat berdamai, Fadhlullah SE atau Dek Fad masih akan terus berjuang untuk pemenuhan hak-hak masyarakat Aceh sebagaimana dalam butir-butir MoU Helsinki. Bagi Dek Fad, perjuangannya kini tidak lagi menggunakan senjata seperti tempo dulu, melainkan lewat jalur politik sebagai anggota DPR-RI. Ia berada di Komisi I yang memiliki tugas di bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen.

Di dalam setiap kesempatan, Dek Fad yang maju melalui Partai Gerindra selalu mengatakan kepada mitra kerjanya bahwa ia adalah seorang GAM. Bahkan ucapan itu tak segan-segan ia sampaikan di hadapan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, maupun Kapolri. "Sampai kapan pun saya adalah orang GAM. Di Senayan pun saya nyatakan kalau saya seorang GAM," ujarnya.

Sebagai legislator yang mewakili suara Rakyat Aceh di Jakarta, Dek Fad memiliki tanggung jawab besar terhadap penyelesaian permasalahan yang terjadi di Aceh. Pria kelahiran Teupin Raya Pidie ini mengatakan bahwa dirinya masuk dalam tim Otonomi Khusus (Otsus) Aceh-Papua.

"DPR-RI ini ada namanya Forbes (forum bersama), yang ketuanya adalah Bang Nasir Djamil. Jadi setiap apa yang diinginkan oleh Aceh dan kepentingannya, kita akan bergerak bersama," ujarnya, termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) dan tanah untuk eks kombatan GAM.

Dek Fad juga mendorong pemerintah Aceh untuk menerbitkan buku catatan sejarah konflik di Aceh yang dimulai dari 1976 hingga musibah Tsunami 2004 dan perdamaian di 2005. Apalagi, Pemerintah Indonesia telah menyatakan tiga peristiwa Simpang KKA, Rumoh Geudong, dan Jambo Keupok sebagai pelanggar HAM berat.

"Kami dari Fraksi Gerindra akan mengusulkan ke Pemerintah Aceh untuk memasukkan catatan konflik Aceh ini ke dalam program. Jadi supaya anak cucu kita harus tau bahwa Aceh pernah konflik selama 30 tahun. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tak pernah melupakan sejarah," kata dia.

Selain itu, Dek Fad juga terbilang aktif dalam membantu warga. Sejak terpilih kembali untuk periode 2019-2024, ia telah memberikan bantuan modal usaha kepada 10.000 orang yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Aceh

Harapan Dek Fad

Sebagai pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Fadhlullah SE atau Dek Fad telah melihat perubahan pada Aceh setelah perdamaian dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tapi menurutnya, perubahan itu belum maksimal seperti yang diharapkan oleh masyarakat. "Masyarakat menginginkan Aceh ini makmur dan adil. Jangan sampai kita ini menjadi kuli dan penonton di negeri sendiri," katanya.

Karena itu, lanjut Dek Fad, pihaknya akan selalu berada di garis depan untuk mengawal kinerja Pemerintah Aceh. "Dalam banyak kesempatan, Pak Prabowo berpesan kepada kami untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, karena Partai Gerindra ingin melakukan perubahan dan membantu rakyat kecil dan tertindas," pungkas Dek Fad.(*)